

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2020

Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Konsial Tenaga Kesehatan Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 12 Januari 2021
Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
NIP.196201231986111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Januari 2021

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)

NIP 196201231986111001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24,446,251,457 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24,446,251,457 atau mencapai 148.16 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp16,500,000,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24,210,237,690 atau mencapai 97.29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24,884,361,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp2,502,432,356 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp858,529,270; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1,643,903,086 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp367,400,000 dan Rp2,135,032,356

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24,698,185,000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24,740,885,768 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-42,700,768, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp58,682,965 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp15,982,197.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp2,312,743,460, ditambah Surplus-LO sebesar Rp15,982,197 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -193,693,301 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp2,135,032,356

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

U R A I A N	Catatan	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	16,500,000,000	24,446,251,457	148.16	18,576,900,000
JUMLAH PENDAPATAN		16,500,000,000	24,446,251,457	148.16	18,576,900,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	22,860,257,000	22,192,117,690	97.08	25,273,103,819
Belanja Modal	B.2.3	2,024,104,000	2,018,120,000	99.70	1,105,156,650
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		24,884,361,000	24,210,237,690	97.29	26,378,260,469

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	24,698,185,000	17,951,700,000
Jumlah Pendapatan		24,698,185,000	17,951,700,000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	3,119,107,490	1,684,807,940
Beban Barang dan Jasa	D.5	15,611,424,673	11,714,530,790
Beban Pemeliharaan	D.6	59,848,193	30,963,800
Beban Perjalanan Dinas	D.7	4,471,876,984	11,973,453,119
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1,478,628,428	917,352,977
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		24,740,885,768	26,321,108,626
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(42,700,768)	(8,369,408,626)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	58,682,965	196,985,350
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		58,682,965	196,985,350
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		15,982,197	(8,172,423,276)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		15,982,197	(8,172,423,276)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	2,312,743,460	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	15,982,197	(8,172,423,276)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(193,693,301)	10,471,977,966
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(177,711,104)	2,299,554,690
EKUITAS AKHIR	E.6	2,135,032,356	2,299,554,690

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

U R A I A N	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	858,529,270	1,849,347,412
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		858,529,270	1,849,347,412
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	4,612,276,907	2,943,566,443
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	10,670,000	10,670,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(2,979,043,821)	(2,229,115,411)
Jumlah Aset Tetap		1,643,903,086	725,121,032
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	3,222,627,300	2,407,859,300
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(3,222,627,300)	(2,044,384,284)
Jumlah Aset Lainnya		-	363,475,016
JUMLAH ASET		2,502,432,356	2,937,943,460
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	367,400,000	625,200,000
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		367,400,000	625,200,000
JUMLAH KEWAJIBAN		367,400,000	625,200,000
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	2,135,032,356	2,312,743,460
JUMLAH EKUITAS		2,135,032,356	2,312,743,460
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2,502,432,356	2,937,943,460

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, membentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.

KTKI berfungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan yang memiliki tugas :

- a. melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan
- c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan
- d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan
- e. menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan

Hingga 31 Desember 2019, anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan belum diangkat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017, anggota Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya KTKI dibantu oleh sekretariat. Berdasarkan amanat tersebut, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Menteri Kesehatan membentuk Sekretariat KTKI yang berkedudukan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggungjawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administrasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Sebelumnya tugas dan Sekretariat KTKI merupakan salah satu tugas dari Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, maka organisasi dan tata kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan juga turut diubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Walaupun telah terbentuk Tahun 2018, Sekretariat KTKI baru memiliki kegiatan dan anggaran tersendiri pada Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-024.12.1.416226/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Sekretariat KTKI bertanggung jawab atas Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan sasaran terselenggaranya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan sekretariat
- b. pelaksanaan dukungan registrasi tenaga kesehatan
- c. pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian tenaga kesehatan
- d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan
- e. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan sekretariat
- g. pelaksanaan administrasi KTKI dan sekretariat

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	25,000,000,000	16,500,000,000
Jumlah Pendapatan	25,000,000,000	16,500,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	19,860,257,000	22,860,257,000
Belanja Modal	2,024,104,000	2,024,104,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	21,884,361,000	24,884,361,000

Realisasi Pendapatan
Rp24,446,251,457

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24,446,251,457 atau mencapai 148.16 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp16,500,000,000. Pendapatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24,446,251,457. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16,500,000,000	24,446,251,457	148.16
Jumlah	16,500,000,000	24,446,251,457	148.16

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 31.59 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	24,446,251,457	18,576,900,000	31.59
Jumlah	24,446,251,457	18,576,900,000	31.59

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
--------	---------------------	---------------------	---

Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24,446,251,457 dan Rp18,576,900,000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 31.59 dari TA 2019 setoran sitaan hasil korupsi di tahun 2020 meningkat drastis. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,446,251,457	18,576,900,000	31.59
Jumlah	24,446,251,457	18,576,900,000	31.59

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	-	-	-
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5,866,457	-	-
Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	24,440,385,000	18,576,900,000	31.56
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	24,446,251,457	18,576,900,000	31.59

B.2 Belanja

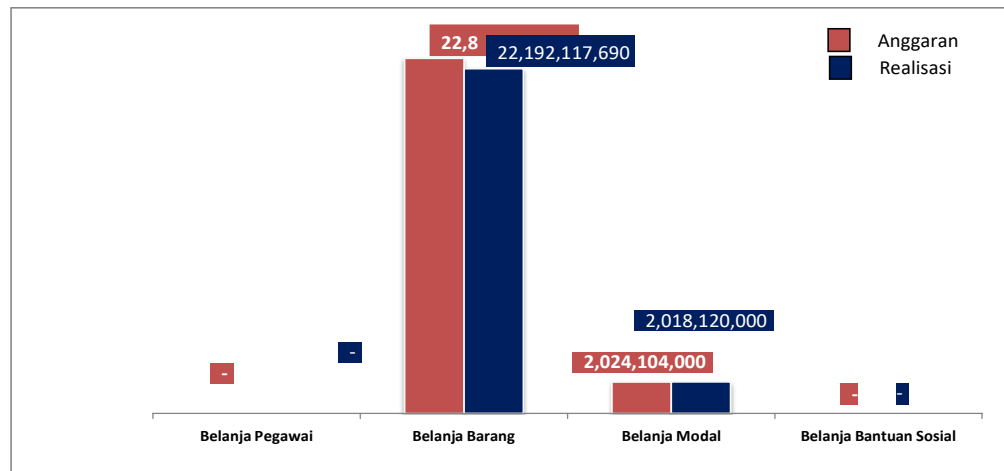
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp24,210,237,690 atau 97.29 % dari anggaran belanja sebesar Rp.24,884,361,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	22,860,257,000	22,192,117,690	97.08
Belanja Modal	2,024,104,000	2,018,120,000	99.70
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	24,884,361,000	24,210,237,690	97.29

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 8.22% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	22,192,117,690	25,273,103,819	(12.19)
Belanja Modal	2,018,120,000	1,105,156,650	82.61
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	24,210,237,690	26,378,260,469	(8.22)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar 0,00 % dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22,192,117,690 dan Rp25,273,103,819. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 12.19% dari Realisasi TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	11,359,612,539	6,584,338,188	72.52
Belanja Barang Non Operasional	1,856,846,433	2,192,763,172	(15.32)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,049,031,340	1,554,156,110	31.84
Belanja Jasa	2,395,185,701	2,950,904,430	(18.83)
Belanja Pemeliharaan	59,848,193	30,963,800	93.28
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,701,701,896	12,580,401,119	(62.63)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	22,422,226,102	25,893,526,819	(13.41)
Pengembalian Belanja	230,108,412	620,423,000	(62.91)
Jumlah Belanja	22,192,117,690	25,273,103,819	(12.19)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp807,442,000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp788,606,045 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2020

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	202,742,000	191,448,257	94.43
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21,220,000	20,094,188	94.69
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7,800,000	7,800,000	100.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	575,680,000	569,263,600	98.89
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja	807,442,000	788,606,045	97.67

Realisasi Belanja Modal
Rp2,018,120,000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2,018,120,000 dan Rp1,105,156,650. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 82.61% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh tahun 2020 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alt kantor.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,522,192,000	414,439,150	267.29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	495,928,000	690,717,500	(28.20)
Jumlah Belanja Kotor	2,018,120,000	1,105,156,650	82.61
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,018,120,000	1,105,156,650	82.61

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1,522,192,000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1,522,192,000 dan Rp414,439,150, mengalami kenaikan sebesar 267.29 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,522,192,000	414,439,150	267.29
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,522,192,000	414,439,150	267.29
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,522,192,000	414,439,150	267.29

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2019. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp495,928,000

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp495,928,000 dan Rp690,717,500, mengalami penurunan sebesar 28.20 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Lainnya	495,928,000	690,717,500	(28.20)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	495,928,000	690,717,500	(28.20)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	495,928,000	690,717,500	(28.20)

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2019. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Rekening BNI	-	-
di brankas	-	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

*Persediaan
Rp858,529,270*

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp858,529,270 dan Rp1,849,347,412. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019
Barang Konsumsi	858,529,270	1,848,720,412
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	858,529,270	1,848,720,412

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2020 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2020 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2020

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp4,612,276,907

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp4,612,276,907 dan Rp2,943,566,443. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	2,943,566,443
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	2,943,566,443
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(2,977,309,946)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	(33,743,503)

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a.
- b.
- c.
- d.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -
- -
- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -
- -
- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp10,670,000

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.10,670,000 dan Rp.10,670,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	10,670,000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	10,670,000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(1,733,875)
Nilai Buku per	8,936,125

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -
- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -
- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp2,979,043,821 dan Rp2,229,115,411. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2020

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,612,276,907	(2,977,309,946)	1,634,966,961
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,670,000	(1,733,875)	8,936,125
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		4,622,946,907	(2,979,043,821)	1,643,903,086

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
-		-
-		-
-		-
-		-
Jumlah		-

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp3,222,627,300 dan Rp2,407,859,300. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2020	2,407,859,300
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2020	2,407,859,300
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(3,222,627,300)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	(814,768,000)

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2020	T.A. 2019
Dana Lainnya	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2020	T.A. 2019
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-
Mutasi Kurang	
-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 3,222,627,300

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp3,222,627,300 dan Rp2,044,384,284. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	3,222,627,300	(3,222,627,300)	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	3,222,627,300	(3,222,627,300)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
	-	-
	-	-

Total	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp367,400,000

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp367,400,000 dan Rp625,200,000. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2019
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0*

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

*Ekuitas
Rp2,135,032,356*

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2,135,032,356. dan Rp2,312,743,460. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp24,698,185,000

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp24,698,185,000 dan Rp17,951,700,000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 37.58. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
Jumlah	24,698,185,000.00	17,951,700,000.00	37.58

Beban Pegawai Rp0

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-

Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp3,119,107,490

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,119,107,490 dan Rp1,684,807,940

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 85.13 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Beban Persediaan konsumsi	3,118,480,490	1,681,672,940	85.44
Beban Persediaan bahan baku	627,000	3,135,000	(80.00)
Jumlah Beban Persediaan	3,119,107,490.00	1,684,807,940	85.13

Beban Barang dan Jasa
Rp15,611,424,673

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15,611,424,673 dan Rp11,714,530,790.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 33.27 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Keperluan Perkantoran	3,146,277,224	478,259,029	557.86
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,872,484,058	4,201,259,159	87.38
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	149,403,000	1,904,820,000	(92.16)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	191,448,257	-	-
Beban Bahan	1,262,952,245	1,114,432,172	13.33
Beban Honor Output Kegiatan	570,800,000	1,022,331,000	(44.17)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	56,000,000	(94.64)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,094,188	-	-
Beban Jasa Konsultan	49,302,500	-	-
Jumlah	15,611,424,673	11,714,530,790.00	33.27

Beban Pemeliharaan
Rp59,848,193

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59,848,193 dan Rp30,963,800.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 93.28 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,848,193	30,963,800	93.28
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	59,848,193	30,963,800	93.28

Beban Perjalanan Dinas
Rp4,471,876,984

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4,471,876,984 dan Rp11,973,453,119

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 62.65 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Perjalanan Biasa	1,014,452,971	2,691,068,224	(62.30)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	219,300,000	478,800,000	(54.20)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,310,574,413	2,190,127,000	(40.16)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi CO	569,263,600	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,358,286,000	6,613,457,895	(79.46)
	-	-	-
Jumlah	4,471,876,984.00	11,973,453,119	(62.65)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1,478,628,428

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,478,628,428 dan Rp917,352,977.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	618,958,662	243,444,943	154.25
Beban Penyusutan Jaringan	266,750	266,750	-
Beban Amortisasi Software	859,403,016	673,641,284	27.58
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	1,478,628,428	917,352,977	61.18
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1,478,628,428	917,352,977	61.18

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2020	2019	0.05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	2020	2019	0.05
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
Lainnya Rp58,682,965

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp58,682,965 dan Rp196,985,350.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5,866,457	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	104,218,166	227,064,340.00	(54)
Jumlah	110,084,623.00	227,064,340	(51.52)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	191,448,257	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,094,188	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7,800,000	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	569,263,600	-	-
	-	-	-
Jumlah	788,606,045.00	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000 , sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.2,312,743,460.00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.2,312,743,460.00 dan Rp.0.00

Defisit LO
Rp.15,982,197.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.15,982,197.00 dan Rp.-8,172,423,276.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-193,693,301 dan Rp.10,471,977,966. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	24,210,237,690
Diterima dari Entitas Lain	(24,446,251,457)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	42,320,466
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	(193,693,301)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 24,210,237,690, sedangkan DDEL sebesar Rp 24,446,251,457

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2020

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp42,320,466 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2020

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp2,135,032,356*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.2,135,032,356.00 dan Rp.2,299,554,690.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. DIPA-024.12.1.416226/2020 tanggal 12 November 2019 dimana Pagu awal sebesar Rp.28.483.625.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp.26.459.521.000,- Belanja Modal Rp.2.024.104.000,-
2. Revisi ke-01 DIPA tanggal 24 Februari 2020 dimana Pagu sebesar Rp.28.483.625.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp.19.860.257.000,- Belanja Modal Rp.2.024.104.000,-
3. Revisi ke-02 DIPA tanggal 06 Mei 2020 dimana Pagu sebesar Rp.21.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp.19.860.257.000,- Belanja Modal Rp.2.024.104.000,-
4. Revisi ke-03 DIPA tanggal 26 Juni 2020 dimana Pagu sebesar Rp. 21.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp. 19.860.257.000,- Belanja Modal Rp. 2.024.104.000,-
5. Revisi ke-04 DIPA tanggal 24 Agustus 2020 dimana Pagu sebesar Rp. 21.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp. 19.860.257.000,- Belanja Modal Rp. 2.024.104.000,-
6. Revisi ke-05 DIPA tanggal 25 September 2020 dimana Pagu sebesar Rp. 21.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp. 19.860.257.000,- Belanja Modal Rp. 2.024.104.000,-
7. Revisi ke-06 DIPA tanggal 3 November 2020 dimana Pagu sebesar Rp. 24.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp. 22.860.257.000,- Belanja Modal Rp. 2.024.104.000,-
8. Revisi ke-07 DIPA tanggal 5 Desember 2020 dimana Pagu sebesar Rp. 24.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp. 22.860.257.000,- Belanja Modal Rp. 2.024.104.000,-
9. Revisi ke-08 DIPA tanggal 18 Desember 2020 dimana Pagu sebesar Rp. 24.884.361.000,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp.0,- Belanja Barang Rp. 22.860.257.000,- Belanja Modal Rp. 2.024.104.000,-
10. Terdapat realisasi terkait penanganan COVID-19 sebesar Rp. 788.906.045,-, dengan rincian per akunnya:
 - a. 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 Rp. 191.448.257,-
Berupa:
 - o Pencegahan COVID-19 (masker, hand sanitizer, dan lain-lain)
 - o Penambah daya tahan tubuh
 - b. 521241 Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 Rp.20.094.188,-
Berupa:
 - o Komsumsi bagi pegawai Work From Office (WFO) di masa PSBB, Pembelian Thermogun dan tempat cuci tangan untuk beberapa titik untuk kegiatan sosialisasi protocol kesehatan di Bandung

c. 524115 Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19 Rp.569.563.600,-.

Berupa:

- Transport local dan uang harian rapat lebih dari 8 Jam untuk rekrutmen relawan tenaga Kesehatan penanggulangan COVID-19

d. 522192 Belanja Jasa – Penanganan pandemic COVID-19 Rp.7.800.000

Berupa:

- Narasumber dan Moderator dalam rangka sosialisasi protocol kesehatan tanggal 24 November 2020

Terdapat transfer masuk barang persediaan berupa cetakan senilai Rp.26.505.000,- dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Nomor HK.02.07/3/1176/2020 Tanggal 30 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Masuk berupa Peralatan Amplop Coklat KFN sebanyak 40 Pack senilai Rp.12.000.000,-
- Transfer Masuk berupa surat sumpah logo garuda sebanyak 1.500 lembar senilai Rp.2.625.000,-
- Transfer Masuk berupa blangko STRA sebanyak 4.000 lembar senilai Rp. 10,560,000,-
- Transfer Masuk berupa Kop KFN sebanyak 15 Pack senilai Rp.1.320.000,-

12. Terdapat transfer masuk berupa Software senilai Rp.318.840.000,- dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Nomor HK.02.07/3/1177/2020 Tanggal 30 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Masuk berupa software SPSE STRA Online sebanyak 1 Unit senilai Rp.318.840.000,-

13. Terdapat transfer masuk berupa peralatan dan mesin senilai Rp. 146.518.464,- dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Nomor HK.02.07/3/1175/2020 Tanggal 30 Maret 2020.

14. Terdapat Pendapatan diterima dimuka berupa Surat Tanda Registrasi (425316) sesuai dengan Formulir Memo Penyesuaian dengan No. Dokumen 004, yang belum selesai proses penerbitannya untuk 1.472 pemohon dengan nominal 367.400.000